

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202294342, 25 November 2022

Pencipta

Nama : **SRI LESTARI HARJANTA, S.IP.,M.Si dan DYALOKA PUSPITA NINGRUM,S.I.Kom.,M.I.Kom**
Alamat : Jl. Jengger Jongkang RT. 009 RW. 037 Kel/Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman D.I.Yogyakarta , Sleman, DI YOGYAKARTA, 55581
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **SRI LESTARI HARJANTA, S.IP.,M.Si dan DYALOKA PUSPITA NINGRUM,S.I.Kom.,M.I.Kom**
Alamat : Jl. Jengger Jongkang RT. 009 RW. 037 Kel/Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman D.I.Yogyakarta , Sleman, DI YOGYAKARTA, 55581
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **TANTANGAN PENERAPAN COLLABORATIVE WATER GOVERNANCE DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA DI TENGAH ANCAMAN BENCANA KRISIS AIR**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 November 2022, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000410086

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



Ketua Peneliti
Sri Lestari Harjanta, S.I.P., M.Si.
NIDN : 0420058005



Anggota Peneliti
Dyalyoka Puspita Ningrum, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIDN : 0515069501



TANTANGAN PENERAPAN COLLABORATIVE WATER GOVERNANCE DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA DI TENGAH ANCAMAN BENCANA KRISIS AIR

LATAR BELAKANG MASALAH

- Ekosistem di sekitar Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kemakmuran berupa sumber air. Sumber air itu pun dimanfaatkan warga di tiga wilayah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
- Kendati memiliki potensi sumber air yang begitu melimpah, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta itu sendiri dalam kenyataannya tetap berada dalam bayang-bayang bencana krisis air.
- Sehingga berangkat dari kondisi yang ada, maka perlu ditinjau lebih dalam terkait tata kelola air di tingkat lokal yang mengacu pada model penerapan collaborative water governance.

MANFAAT PENELITIAN

- Diharapkan dapat menyumbangkan sumbangsi pemikiran dan pengembangan teoritis di bidang tata kelola khususnya terhadap pengelolaan air bersih.
- Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para pemangku kebijakan untuk memperkuat kolaborasi dengan para stakeholders sekaligus membuat regulasi yang semakin jelas terkait konservasi air.
- Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam

TEORI PENDUKUNG

Bakker dan Cohen (2011) mengemukakan, jika ingin menerapkan water governance adalah dengan mengimplementasikan model collaborative water governance. Syarat pelaksanaan collaborative water governance, menurut Bakker dan Cohen yakni, ketika multi stakeholder termasuk non pemerintahan terlibat dalam intensitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan terdapat pendelegasian yang jelas dan signifikan, termasuk untuk aktor-aktor non pemerintahan terkait dengan pengelolaan air.

METODE PENELITIAN

- Peneliti melakukan wawancara mendalam pada beberapa informan kunci, mulai dari perwakilan pihak pemerintah daerah, unsur masyarakat sipil dan pihak swasta yang terkait dengan pengelolaan air di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
- Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait regulasi pengelolaan air di tingkat daerah (Perda/Perbub/Perwal). Sedangkan dalam observasi, peneliti melihat secara langsung kondisi wilayah yang sebelumnya sudah dipetakan sebagai daerah terancam bencana krisis air di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

HASIL & PEMBAHASAN



Gambar 1: Aktor Lokal Pengelolaan Air di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (DIY) Sumber : Dikelola Berdasarkan Hasil Temuan di Lapangan, 2022

Lingkaran berwarna biru besar menunjukkan keadaan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) masih menjadi aktor utama dalam pengelolaan air di Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan kelompok Swasta dan Komunitas/NGO tidak saling bersinggungan atau beririsan. Dalam konsep collaborative water governance pengelolaan air semestinya melibatkan multi aktor. Tidak hanya sebatas melibatkan banyak aktor, tetapi masing-masing pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam pengelolaan air.

PARTISIPASI PUBLIK

Keterlibatan publik dalam pengelolaan air di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta bisa dikatakan minim. Komunitas Banyu Bening, salah satu NGO yang konsen terhadap konservasi air melihat Pemerintah Daerah memosisikan warga sebagai obyek bukan subyek dalam pengelolaan.

KEJELASAN REGULASI

Belum tersedianya aturan turunan dari Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA). Misalkan di Kabupaten Sleman, regulasi yang terkait tata kelola air adalah Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Irigasi. Sementara itu di Kota Yogyakarta belum lama ini hanya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN

- Pengelolaan air di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masuk dalam Traditional Governance. Secara keseluruhan keterlibatan aktor di luar pemerintahan dalam pengelolaan air masih sangat minim, baik di wilayah Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta. Di sisi lain juga terlihat bahwa hanya pihak pemerintah daerah saja yang lebih dominan dalam urusan pengelolaan air tersebut.
- Selain itu, kelompok komunitas atau NGO pun khususnya mendapatkan peran yang tidak signifikan. Dalam aspek partisipasi tampak ruang yang disediakan pemerintah daerah untuk keterlibatan unsur publik juga masih sangat minim. Sedangkan pada aspek regulasi, masih belum tersedianya aturan yang cukup komprehensif termasuk soal konservasi air di wilayah Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta.



LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: HAK CIPTA (PROGRAM APLIKASI KOMPUTER)

Judul Karya Ilmiah (Aplikasi) : TANTANGAN PENERAPAN COLLABORATIVE WATER GOVERNANCE DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA DI TENGAH ANCAMAN BENCANA KRISIS AIR

Jumlah Pembuat : 2

Status Pengusul : Pembuat Pertama

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Aplikasi : Poster

b. Nomor Permohonan HAKI : EC00202294342

c. Nomor Pencatatan HAKI : 000410086

d. Penerbit HAKI : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

e. URL Panduan Aplikasi : <https://fisipol.widyamataram.ac.id/>

f. URL Sertifikat Hak Cipta : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZjNjMzdhdNTAOMzNINjUzNmlyMTJhNTNhYjJjYzhZjAK>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \surd pada kategori yang tepat) :

Hak Cipta Karya Teknologi Internasional

Hak Cipta Karya Teknologi Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal HAKI Karya Teknologi Nasional: 20 Ak.		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional (Maks. 20)	
a. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi Konten Aplikasi (20%)	-	4	4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Aplikasi (30%)	-	6	6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi pada Aplikasi (30%)	-	6	6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas Aplikasi (20%)	-	4	4
Total = (100%)	-	20	20
Kontribusi Pengusul (Pembuat Tunggal)			20 x 60 % = 12
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur Aplikasi: Unsur poster yang diajukan HAKI cukup lengkap dan sesuai kriteria standar ilmiah. 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan Aplikasi: Ruang lingkup poster menarik dan edukatif 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi Aplikasi: Data dan referensi yang disajikan sangat relevan. 4. Kelengkapan unsur kualitas Aplikasi: Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2022. 5. Indikasi plagiasi: Tidak ada unsur plagiasi. 6. Kesesuaian bidang ilmu: Sesuai.		

Yogyakarta, 13 Maret 2024
 Reviewer 1



Dra. Syakdiah, M.Si
 NIDN/Jabatan Akademik: Lektor Kepala
 Unit Kerja: Prodi Administrasi Publik UWM

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: HAK CIPTA (PROGRAM APLIKASI KOMPUTER)

Judul Karya Ilmiah (Aplikasi) : TANTANGAN PENERAPAN COLLABORATIVE WATER GOVERNANCE DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA DI TENGAH ANCAMAN BENCANA KRISIS AIR

Jumlah Pembuat : 2

Status Pengusul : Pembuat Kedua

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Aplikasi : Poster
b. Nomor Permohonan HAKI : EC00202282531

c. Nomor Pencatatan HAKI : 000410086
d. Penerbit HAKI : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
e. URL Panduan Aplikasi : <https://fisipol.widyamataram.ac.id/>
f. URL Sertifikat Hak Cipta : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZjNjMzdhdNTA0MzNINjUzNmIyMTJhNTNhYjJjYzhZjAK>

Kategori Publikasi Jurnal : Hak Cipta Karya Teknologi Internasional
Ilmiah (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Hak Cipta Karya Teknologi Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal HAKI Karya Teknologi Nasional: 20 Ak.		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional (Maks. 20)	
e. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi Konten Aplikasi (20%)	-	4	4
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Aplikasi (30%)	-	6	6
g. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi pada Aplikasi (30%)	-	6	6
h. Kelengkapan unsur dan kualitas Aplikasi (20%)	-	4	4
Total = (100%)	-	20	20
Kontribusi Pengusul (Pembuat Tunggal)			20 x 60 % = 12
KOMENTAR PEER REVIEW :	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur Aplikasi: Substansi poster sudah sesuai dengan alur. 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan Aplikasi: Isi poster merupakan hasil penelitian. Sangat menarik untuk diteruskan menjadi publikasi ilmiah. 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi Aplikasi: Data yang disajikan terbaru berdasarkan hasil temuan di lapangan. 4. Kelengkapan unsur kualitas Aplikasi: Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. 5. Indikasi plagiasi: Tidak didapati dengan penggunaan data terbaru. 6. Kesesuaian bidang ilmu: Poster sesuai dengan bidang ilmu administrasi publik		

Yogyakarta, 13 Maret 2024
Reviewer 2



Suwarjo, S.IP, M.Si
NIDN/Jabatan Akademik: Lektor